

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1945 provinsi Sumatera ini terus mengalami perkembangan, di mana Sumatera ini di bagi atas tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan bagian Selatan. Maka waktu itu Residen Jambi termasuk Kewedanaan Bangko masuk kedalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada Tanggal 9 Agustus 1957 dengan berdasarkan kepada UU Darurat No. 19/1957 pemerintah membubarkan Provinsi Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera Tengah dibentuk berdasarkan Perpu No. 4 tahun 1950. Undang-undang darurat tersebut membagi Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I (atau yang lebih dikenal dengan Daswati I), yaitu; Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau.¹

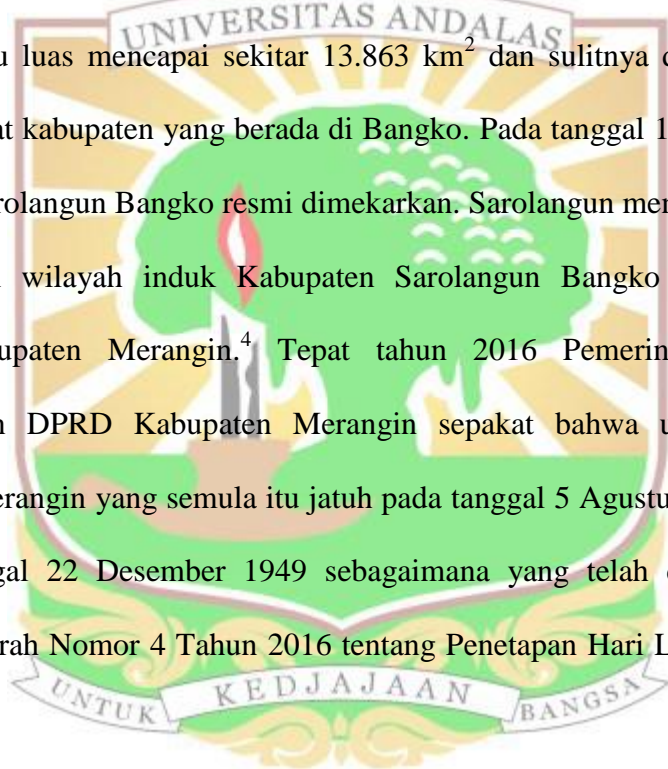
Setelah Jambi menjadi daerah Daswati Tingkat I, Kewedanaan Sarolangun, Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Bungo, dan Kewedanaan Tebo tergabung dalam Kabupaten Merangin.² Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo pada tahun 1965. Mulai saat itulah Kabupaten Sarolangun berada di dalam

¹ Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 139.

² Ratna PurnamaSari, "Pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko : Lahirnya Kabupaten sarolangun dan Dampaknya terhadap Perkembangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun 1999-2011", *Skripsi*, (Padang : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2017).

wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko yang beribukota di Bangko.³

Kabupaten Sarolangun Bangko berdiri cukup lama mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1999, karena pada tahun 1999 tercetuslah bahwasanya daerah Sarolangun ingin memekarkan diri dari kabupaten induk dengan suatu alasan. Dimekarkannya Kabupaten Sarolangun Bangko ini merupakan tuntutan dari masyarakat yang tinggal di Sarolangun, karena Kabupaten Sarolangun Bangko terlalu luas mencapai sekitar 13.863 km² dan sulitnya daerah terpencil mencapai pusat kabupaten yang berada di Bangko. Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun Bangko resmi dimekarkan. Sarolangun menjadi Kabupaten tersendiri dan wilayah induk Kabupaten Sarolangun Bangko berubah nama menjadi Kabupaten Merangin.⁴ Tepat tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin sepakat bahwa untuk hari jadi Kabupaten Merangin yang semula itu jatuh pada tanggal 5 Agustus 1965 di rubah menjadi tanggal 22 Desember 1949 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahir Kabupaten Merangin.⁵



Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk setelah berlakunya otonomi daerah pasca Orde Baru. Kabupaten Merangin

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, *Merangin Dalam Angka 2015*, (Jambi: BPS, 2015), hlm. xxi.

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Profil Kabupaten Merangin Tahun 2017*, (Merangin: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, 2017).

merupakan Kabupaten Induk serta penciutan dari Kabupaten Sarolangun Bangko. Pembentukan Kabupaten Merangin itu berdasarkan Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 itu menjadikan wilayah Provinsi Jambi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota. Kabupaten tersebut adalah Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo dan Kerinci dengan dua kota yaitu Kota Jambi dan Sungai Penuh.⁶

Tabel 1. Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Merangin.

No	Kecamatan di Kabupaten Merangin tahun 2015
1.	Jangkat
2.	Sungai Tenang
3.	Muara Siau
4.	Lembah Mesurai
5.	Tiang Pumpung
6.	Pamenang
7.	Pamenang Barat
8.	Renah Pamenang
9.	Pamenang Selatan
10.	Bangko
11.	Bangko Barat
12.	Nalo Tantan
13.	Batang Mesumai
14.	Sungai Manau
15.	Renah Pembarap
16.	Pangkalan Jambu
17.	Tabir
18.	Tabir Ulu
19.	Selatan
20.	Tabir Ilir
21.	Tabir Timur
22.	Tabir Lintas
23.	Tabir Margo Tabir

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin tahun 2015.

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa, jumlah kecamatan di Kabupaten Merangin terus mengalami pertambahan yang di akibatkan oleh pemekaran desa. Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang. Tujuan dari pemekaran tersebut ialah dalam rangka mempercepat laju pembangunan.

Selain itu Kabupaten Merangin juga mendapatkan Piala Adipura Buana kategori kota kecil bersih khusus Kota Bangko di bawah kepemimpinan Bupati Al-Haris dan Wakil Bupati H. A. Khafid Moein. Pada tahun 2016 berhasil meraih Piala Adipura Buana, ini merupakan hal yang membanggakan bagi Kabupaten Merangin menerima penghargaan bertaraf nasional ini. Selain itu empat Piala Adipura Buana di raih Kabupaten Merangin di masa kepemimpinan sebelumnya.⁷

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh batasan spasial, yaitu Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sementara batasan temporalnya diambil dari tahun 1999-2016. Alasan tahun 1999 dijadikan sebagai batasan awal karena pada tahun tersebut terjadi proses pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko dan lahirnya Kabupaten Merangin. Tahun 2016 menjadi batasan akhir dari penelitian ini dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Merangin meraih penghargaan Adipura Buana ketegori

⁷ Andy, Liputan Jambi.Com: Merangin Sukses Raih Adipura 2016, dalam http://www.liputan_jambi.com/2016/07/18/merangin-sukses-raih-adipura-2016 di unggah pada tanggal 23 Juli 2016.

kota kecil yakni tahun 2016 dibawah kepemimpinan Bupati Al Haris dan Wakil bupati A Khafid Moein. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Merangin menerima penghargaan bertaraf nasional ini.

Pada rentangan waktu dari tahun 1999-2016, sudah tiga kali terjadi pergantian pemimpin. Namun pada saat Bupati Al Haris dan Wakil bupati A Khafid Moein menjabat dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Merangin telah mengalami banyak kemajuan dibidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Dalam penulisan ini, peneliti mengkaji tentang sejarah Kabupaten Merangin di provinsi Jambi.

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan guna memudahkan sebagai dasar pengembangan tulisan:

1. Bagaimana lahirnya Kabupaten Merangin tahun 1949 serta terbentuknya Kabupaten Sarolangun Bangko?
2. Mengapa Kabupaten Sarolangun Bangko di mekarkan?
3. Bagaimana perkembangan Kabupaten Merangin tahun 1999-2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya Kabupaten Merangin di provinsi Jambi. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji apa-apa saja yang menjadi penyebab lahirnya kabupaten Merangin tahun 1949 dan terbentuknya Kabupaten Sarolangun Bangko.
2. Mengkaji apa-apa saja yang menjadi penyebab di mekarkannya Kabupaten Sarolangun Bangko.

3. Menjelaskan perkembangan Kabupaten Merangin tahun 1999-2016.

Manfaat dari penelitian ini mengenai sejarah Kabupaten Merangin ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan gambaran mengenai penyebab dimekarkannya Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi Kabupaten Merangin, selain itu juga untuk mengisi kekosongan literatur sejarah Kabupaten Merangin serta rekomendasi-rekomendasi yang dipakai oleh pemerintah. Yang dimana belum ada penelitian terdahulu yang membahas Kabupaten Merangin secara mendalam. Sehingga diharapkan menjadi suatu tulisan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui Sejarah Kabupaten Merangin tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Leedy (1997) bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal, dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti masalah yang dihadapi.

Kedua, buku *Sumatera Tengah 1954* terbitan Departemen Penerangan Provinsi Sumatera Tengah. Buku ini menjelaskan Provinsi Sumatera Tengah meliputi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Saat itu sulit untuk mencapai daerah pedalaman, terpaksa berbasah-basah bila jembatan tidak ada. Dalam buku ini, dilaporkan segala keadaan dan kegiatan masyarakat Provinsi Sumatera Tengah di

segala bidang, baik ekonomi, produksi, pertanian, perkebunan, pendidikan termasuk pemberantasan buta huruf dan lainnya.⁸

Ketiga, buku *Jambi dalam Sejarah 1500-1942* oleh Lindayanti dkk. Buku ini menjelaskan perubahan-perubahan aspek sosial, ekonomi dan politik penduduk mulai dari berbentuk Kesultanan sampai dengan setelah Jambi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Provinsi Jambi sendiri dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa, memiliki kekayaan budaya beragam etnis, dan masyarakat Melayu Jambi pun merupakan bangunan dari berbagai suku, seperti Minangkabau, Bugis, Banjar, Palembang dan Jawa.⁹

Skripsi Ratna Purnamasari dengan judul “Pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko: Lahirnya Kabupaten Sarolangun dan Dampaknya terhadap Perkembangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun 1999-2011”. Ratna Purnama Sari menjelaskan mengenai dengan dimekarkannya Kabupaten Sarolangun Bangko merupakan tuntutan yang diperjuangkan masyarakat melalui tokoh masyarakat karena Kabupaten Sarolangun Bangko terlalu luas dan sulitnya daerah-daerah terisolir mencapai pusat Kabupaten yang berada di Bangko. Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun Bangko resmi dimekarkan. Sarolangun menjadi Kabupaten tersendiri dan wilayah induk Kabupaten

⁸ Kementrian Penerangan, *Sumatera Tengah 1954*, (Jakarta: Kementrian Penerangan Republik Indonesia, 1954).

⁹ Lindayati dkk, *Jambi dalam Sejarah 1500-1942* (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013).

Sarolangun Bangko berubah nama menjadi Kabupaten Merangin, berdasarkan Undang-undang No. 54 Tahun 1999.¹⁰

Artikel dengan judul Area Pertempuran Bangko Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1949 oleh Jepmi Noprilian menjelaskan bahwa, pada awal kemerdekaan wilayah keresidenan Jambi yang tadinya hanya satu wilayah kemudian menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Jambi Hulu (Merangin) yang berkedudukan di bangko dan wilayah Jambi Hilir berkedudukan di jambi. Bangko merupakan ibukota dari kabupaten Merangin (sekarang Kabupaten Bungo, Kabupaten tebo, Kabupaten Merangin dan kabupaten sarolangun), pada saat itu wilayah Bangko meliputi Bangko dan Sarolangun dengan pimpinan satu orang yaitu M. Kamil.¹¹

E. Kerangka Analisis

Dalam membuat suatu analisis sejarah ada suatu langkah penting dengan menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka analisis yang didalamnya mencakup berbagai konsep yang akan penulis pakai dalam membuat analisis tersebut.¹² Pengertian *demos-cratos* (demokrasi) secara bahasa adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi juga berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai

¹⁰ Ratna PurnamaSari, "Pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko: Lahirnya Kabupaten Sarolangun dan Dampaknya terhadap Perkembangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun 1999-2011", *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2017).

¹¹ Jepmi Noprilian, "Area Pertempuran Bangko Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1949", *Artikel STKIP PGRI Sumatera Barat*.

¹² Sartono Kartidrjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 2.

keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Makna dari demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah kehidupan termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena dari kebijakan tersebut menentukan kehidupan bernegara.¹³

Otonomi dalam arti sempit berarti 'mandiri' sedangkan dalam arti luas berarti 'berdaya'. Dengan demikian Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri, jika suatu daerah sudah mampu membuat dan mengambil keputusan sendiri maka dapat disebut daerah tersebut sudah berdaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kepada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kepada aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan ini

¹³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), hlm. 110-111.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Pasal I.

mempunyai landasan yang mendasar yaitu teritorial dan fungsional.¹⁵ Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengurangan merupakan penyempitan, penyusutan, dan pengurangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya.¹⁷

Penulisan ini membicarakan perjalanan Kabupaten Merangin dari tahun 1999 sampai 2016, berarti tergolong dalam kajian sejarah lokal dan sejarah pemerintahan secara temporal penulisan ini termasuk kedalam sejarah kontemporer, merupakan satu istilah untuk menyebutkan pembabakan dalam sejarah yang rentang waktu terjadinya tidak terlalu lama dengan masa sekarang,

¹⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Pasal I.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Pasal I dan Pasal II.

atau masa ketika sejarah itu menjadi satu kajian dalam ilmu sejarah.¹⁸ Secara spasial penulisan ini termasuk kategori sejarah lokal. Dimana pengertian sejarah lokal itu sendiri adalah sejarah suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan atau dibuat oleh penulis sejarah, batasan geografisnya dapat berupa suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini telah mencakup dua-tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu dan dapat pula suatu kota atau malahan suatu desa.¹⁹ Menurut H. P. R., Finberg, yang terkenal sebagai pendiri dari “Mahzab Leicester” dalam studi sejarah lokal ialah “Asal-usul, Pertumbuhan, Kemunduran, dan Kejatuhan dari kelompok masyarakat lokal”.²⁰

Menurut Fortes maupun Evans Pritchard, Pemerintahan adalah kekuasaan yang terpusat, yang bergerak secara administratif dan didukung oleh lembaga-lembaga hukum. Tetapi dalam membicarakan masalah pemerintahan, harus memperhatikan masalah pemerintahan, harus memperhatikan kekuasaan yang terpusat. Karena itu kekuasaan terpusat tidak harus terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga tetapi dapat pula orang-orang yang mempunyai kekuasaan atas orang banyak.²¹

Politik lokal adalah aspek-aspek politik di tingkat mikro baik itu secara teritorial, sosial, maupun administratif yang mendasari seluruh entitas dan bangunan politik di tingkat makro. Politik lokal adalah unsur utama dari politik nasional. Sedangkan daerah merupakan elemen dasar sebuah negara, tanpa

¹⁸ Tsabit Azinar Ahmad, *Sejarah Kontroversial Di Indonesia Perspektif Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 27.

¹⁹ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 15.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

²¹ Titi Andonis dkk, *Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Asmat di Irian Jaya* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1994), hlm 8.

daerah mungkin negara tidak ada. Begitu juga dengan politik lokal, tanpa politik lokal politik nasional juga tidak mungkin lahir. Dimasa orde baru pergulatan dan dinamika politik lokal jarang mendapat perhatian, ketika rezim orde baru runtuh dan digantikan oleh Orde Reformasi fenomena politik lokal mulai menggeliat.²² Kasus-kasus lokal yang menjadi drama politik di daerah adalah masalah pemekaran wilayah. Era desentralisasi dan otonomi daerah, salah satunya ditandai dengan banyaknya program pemekaran wilayah, sampai saat sekarang ini program pemekaran wilayah masih berlangsung dan tidak jarang program ini menimbulkan masalah-masalah sosial serta masalah politik yang pelik.²³

Penulisan ini membahas mengenai penyebab terjadinya pemekaran, penciutan, perubahan wilayah yang terjadi akibat pemekaran, semula Kabupaten Sarolangun Bangko itu terdiri dari 9 kecamatan setelah menjadi Kabupaten Merangin itu terdiri dari 24 kecamatan. Perubahan juga terlihat dari bertambahnya sarana pendidikan dan mulai meningkat minat pendidikan terlihat dari bertambahnya jumlah murid. Perubahan dari sektor ekonomi seperti perkebunan karet dan kelapa sawit mengalami peningkatan dari luas tanam serta produksi perkebunan.

F. Metode Penulisan dan Sumber Penulisan

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian ilmu sejarah, menurut Kenneth D Billey, metode adalah teknik riset atau alat yang digunakan untuk

²² Abd. Halim, *Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa), hlm. 5-7.

²³ *Ibid.*, hlm. 18.

mengumpulkan data.²⁴ Dalam penulisannya terdapat empat tahap metode sejarah yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.²⁵ Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapannya:

1. Heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya dan menelusuri jejak-jejak sejarah.
2. Kritik, yaitu untuk mencari kebenaran, fakta, kebenaran sejarah dan apa yang sebenarnya terjadi.
3. Interpretasi/Penafsiran, yaitu tahap pemahaman dan penyusunan informasi yang telah benar secara kronologis atau mengkaji fakta-fakta sejarah yang telah di dapatkan.
4. Historiografi, yaitu menyampaikan klimak dalam penelitian sejarah setelah fakta dirangkai sesuai dengan tahapan-tahapan yang baku, maka selanjutnya hasil tersebut dilaporkan dalam bentuk lisan.

Dalam penulisan ini, studi pustaka juga digunakan untuk menunjang penulisan ini. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan S2 Sejarah Universitas Andalas, Pusat Studi Humaniora (PSH), dan Perpustakaan daerah Kabupaten Merangin.

Sumber penulisan ini dapat digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer terbagi atas dua yaitu tertulis dan lisan. Sumber

²⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2003), hlm. 72.

²⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak 2012, hlm. 13.

Primer Tertulis yang ditemukan yaitu Arsip tentang Pemekaran wilayah, Undang-undang, Dokumen foto, semua data tersebut didapatkan dari berbagai Kantor Bupati Bagian Organisasi dan Bagian Hukum. Data Statistik yang didapatkan dari Kantor BPS Merangin dan Kantor Arsip Kabupaten Merangin. Sumber Primer lisan yang digunakan yaitu wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Merangin, Mantan Bupati Merangin tahun 1999, Wakil DPRD Kabupaten Merangin, Ketua RW, Ketua RT, Masyarakat Pendetang dan lain sebagainya. Sumber Sekunder adalah sumber yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Di antara buku yang dimaksud adalah seperti Jambi 1500-1942, Sumatera Tengah 1954 dan Merangin dalam angka yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik, Koran Online Tribun Jambi.Com, Koran Online Liputan Jambi.Com serta berbagai karya lainnya yang menunjang kearah kesempurnaan penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, antara dengan bab berikutnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan.

Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari sub latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II membahas Kabupaten Merangin sebelum tahun 1999, yakni terbentuknya Kabupaten Merangin, Kabupaten Merangin Menjadi dua Kabupaten Sarolangun Bangko dan Bungo Tebo serta kembali kepada Kabupaten Merangin Era Reformasi.

Bab III membahas Perkembangan Kabupaten Merangin tahun 1999-2016, baik itu dari segi Sistem Pemerintahan, Wilayah Kabupaten dan Pemekaran Kecamatan, Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Budaya.

Bab IV berisi kesimpulan tentang persoalan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta apa-apa saja yang telah ditemukan selama penelitian.

